

STUDI TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DI DESA LONG-NAH KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Agustina ¹

ABSTRAK

Agustina, Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusumua, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku dosen pembimbing II, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan/ mendeskripsikan kondisi pembangunan infrastruktur fisik dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur fisik di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu jalan dan jembatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadahan, dan faktor penghambat dalam pembangunan infrastuktur di desa Long-Nah. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key informant yaitu Kepala Desa Long-Nah dan informant penelitian yakni keterwakilan staf kantor desa Long-Nah, Ketua BPD dan Kepala Dusun yang di peroleh melalui metode purposive sampling. Data di kumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif

yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa pembangunan infrastruktur fisik di desa Long-Nah masih ada kekurangan dan belum optimal diantaranya pembangunan jalan yang belum merata, tidak semua jalan di dalam dusun di semenisasi demikian juga dengan jalan antar dusun belum ada yang di semenisasi. Kemudian untuk sarana pendidikan perlu pembangunan gedung baru untuk SDN 011 karena bangunan yang sudah ada hampir longsor. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur di desa Long-Nah adalah masalah mengenai pendanaan atau keuangan yang terbatas dan kadang terlambat disetujui oleh pusat sehingga pembangunan yang ada tidak bisa terealisasikan tepat waktu dan tidak optimal.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Email: agustina9338@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia selama ini telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena terbukti masih besar kesenjangan pembangunan terutama di desa terpencil dan daerah perbatasan.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu pembangunan yang sangat penting bagi suatu daerah, karena pembangunan tersebut dapat mendorong perekonomian masyarakat dalam bentuk investasi. Pembangunan infrastruktur fisik merupakan hal yang sangat vital dalam pembangunan masyarakat dan wilayah disuatu daerah khususnya desa, karena mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperlancar dan mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat. Terutama pembangunan jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan dan tempat-tempat ibadah yang merupakan infrastruktur dan mempercepat pembangunan guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yang mana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diberikanya kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing dengan azas desentralisasi. Sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Posisi Kabupaten dalam Otonomi Daerah telah mendapatkan porsi yang cukup penting dalam menetapkan kebijakan dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 ini daerah juga berkesempatan untuk melakukan pembangunannya sendiri seperti di wilayah pedesaan, dimana wilayah pedesaan ini sangat luas, jumlah penduduknya sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan adalah rendah, ditambah lagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi, dan memperoleh informasi sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Upaya pembangunan daerah pedesaan haruslah menjadi suatu prioritas dan harus mendapat perhatian yang lebih serius untuk masa yang akan datang.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang memiliki 10 Kabupaten/Kota yang mana setiap Kabupaten memiliki banyak Kelurahan/Desa dan Kabupaten yang memiliki banyak Desa/Kelurahan salah satunya yaitu Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur memiliki setidaknya 18 Kecamatan serta 135 Kelurahan/Desa yang perlu melakukan pembangunan infrastruktur disetiap wilayahnya masing-masing. Namun kenyataan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, pelaksanaan pembangunan yang terdapat pada tingkat desa masih tertinggal. Tidak sesuai dengan peran dan fungsi dari desa yang mana banyak memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada di perkotaan. Disisi lain, dana dan program yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa juga tersedia.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak Kecamatan setidaknya ada 18 Kecamatan yang mana setiap kecamatan memiliki Kelurahan/Desa yang membutuhkan Pembangunan Infrastruktur salah satunya yaitu Kecamatan Muara Ancalong. Kecamatan Muara Ancalong memiliki 8 Kelurahan/Desa yang mana beberapa Kelurahan/Desa memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih serius termasuk desa Long-Nah yang mana desa Long-Nah ini merupakan desa yang dikatakan masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak seperti Jalan, Jembatan, Tempat Ibadah, dan juga pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik.

Berikut ini adalah Perencanaan Pembangunan Desa pada bidang infrastruktur di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur di antaranya ialah:

1. Pembangunan perbaikan Jalan Desa
2. Pembangunan perbaikan Jembatan Desa
3. Pembangunan Gedung pendidikan/sarana dan prasarana
4. Pembangunan Puskesmas Desa
5. Pembangunan Tempat Ibadah

Apabila dilihat dari Perencanaan Pembangunan Desa, Desa Long-Nah seharusnya telah menjalankan pembangunan pada bidang infrastruktur sehingga Desa Long-Nah memiliki infrastruktur fisik yang cukup baik serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Long-Nah. Namun pada kenyataannya pembangunan Desa Long-Nah belum ada perkembangan yang signifikan karena masih banyaknya kekurangan yang terdapat pada infrastruktur desa yang ada di Desa Long-Nah.

Dari hasil observasi peneliti di Desa Long-Nah, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Long-Nah yang belum terealisasi, Adapun permasalahan dimiliki oleh Desa Long-Nah, yaitu:

1. Masih terdapatnya jalan-jalan antar dusun yang kondisinya sangat kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembangunan jalan yang baik antar dusun seperti semenisasi jalan.

2. Tidak adanya Puskesmas terdekat untuk masyarakat Desa sehingga banyak masyarakat yang berobat ke Puskesmas pusat yang jarak tempuhnya cukup jauh. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mau untuk berobat ke Puskesmas karena jaraknya yang cukup jauh.
3. Belum adanya kegiatan pembangunan gedung baru untuk sekolah dasar di dusun Belwen yang hampir longsor.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi infrastruktur fisik yang ada di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur fisik di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi infrastruktur fisik di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur fisik di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara mengenai pembangunan infrastruktur fisik.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti lebih lanjut khususnya dibidang penelitian yang sama di waktu mendatang.
2. Dari Segi Praktis :

Sebagai bahan referensi dan informasi, serta masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama Pemerintah Desa Long-Nah serta diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi desa Long-Nah dalam menilai keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Menurut Prajudi dalam Pasolong (2014:9) Teori merupakan suatu pendapat (*opinion, view*) yang diperoleh melalui pemikiran rasional menurut suatu prosedur atau proses tertentu yang disebut sebagai “prosedur akademik” atau prosedur “ilmiah” (*scientific method*) oleh karena melalui langkah-langkah tertentu yang logis dan rasional. Konsep sendiri pun menurut Djamarah (2008:20) dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa).

Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian, Sondang P. (2005:4), pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Hakekat Pembangunan

Secara umum hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakekat ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Selanjutnya pembangunan nasional harus diselenggarakan secara merata di seluruh Negara, bagi masyarakat, dan bukan ditujukan untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok. Hasil dari pembangunan nasional harus benar-benar di rasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan masyarakat.

Tujuan Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- 1) Masyarakat yang adil dan makmur,
- 2) Pemerataan kesejahteraan material dan spiritual.

Kesemuanya itu berdasarkan atas filosofi Negara dalam kondisi yang merdeka, berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkeprikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (LEMHANAS,1997:17-18).

Pendekatan Pembangunan

Menurut Korten dalam Patton (2005:62), pendekatan dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, artinya usaha perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dengan pendekatan pembangunan berorientasi pada masyarakat perlu diubah dengan pendekatan pada masyarakat sebagai figur sentral pembangunan dengan dimensi.

Pengertian Infrastruktur

Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8), pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase,

bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi.

Sistem Infrastruktur

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2005:9). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Komponen Infrastruktur

Seperti telah disebutkan bahwa sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh *American Public Works Association (APWA)*, Infrastruktur di kelompokkan menjadi 13 kategori (Stone dalam Kodoatie, 2005: 121), yaitu:

1. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (*treatment plant*).
2. Sistem pengelolaan air limbah: pengumpulan, pengolahan, pembuangan, daur ulang .
3. Fasilitas pengelolaan limbah padat
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi
5. Fasilitas lintas air dan navigasi
6. Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara (termasuk tanda-tanda lalu lintas dan fasilitas pengontrol)
7. Sistem transit publik
8. Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi
9. Fasilitas gas alam
10. Fasilitas perumahan publik
11. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
12. Komunikasi

Pembangunan infrastruktur

Menurut Effendi (2002:48), pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal

Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Long-Nah(Agustina) dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur

Ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu
2. pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Manfaat Pembangunan Infrastruktur

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai adanya kecenderungan penyelenggaraan pemerintah di daerah akan lebih aman dan lancar, bahkan keefektifan pembangunan daerah akan dapat terwujud. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi daerah hendaknya di selenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien serta tepat sasaran sehingga hasil yang di capai dapat di nikmati oleh semua komponen masyarakat.

Pengertian Desa

Menurut Widjaja (2004:4) desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Desa otonom tidak hanya merupakan obyek dari hukum tetapi juga merupakan subyek dari hukum itu sendiri untuk melakukan tindakan hukum guna menentukan dan memutuskan berbagai kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, serta memungkinkan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi secara nyata.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Fokus Penelitian

1. Pembangunan infrastruktur seperti:

- a. Prasarana jalan dan jembatan
 - b. Sarana pendidikan
 - c. Sarana kesehatan
 - d. Sarana peribadahan
2. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Desa Long-Nah,serta yang menjadi informan lain yaitu Ketua BPD, keterwakilan Staff dan Kepala Dusun.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Kelapangan (*Field Work Research*)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Long-Nah merupakan salah satu desa yang termasuk bagian integral dari Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian

Sarana Jalan dan Jembatan

Dari hasil penelitian di ketahui bahwa kondisi jalan yang ada di desa Long-Nah masih banyak yang rusak, hal ini dapat di lihat dari kondisi jalan yang ada di dalam dusun yang sebagian besar merupakan jalan tanah biasa, tidak semua jalan yang ada di dalam dusun ini di semenisasi begitu pula dengan jalan antar dusun yang tidak ada proses semenisasi sama sekali sehingga jalan anatar dusun ini seringkali mengalami kerusakan parah hingga tidak bisa di lewati oleh penduduk. Kemudian untuk jembatan di desa Long-Nah sudah tersedia 3

Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Long-Nah(Agustina)
jembatan besar yang sudah bisa mencakup semua akses yang di perlukan oleh masyarakat desa Long-Nah dan desa sekitarnya.

Prasarana Pendidikan

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan satu sarana pendidikan yang perlu untuk di relokasikan karena bangunan sudah hampir longsor, bangunan yang perlu di relokasikan ini adalah bangunan sekolah dasar 011 yang berada di dusun Belwen.

Sarana Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di desa Long-Nah tersedia 1 bangunan puskesmas pembantu dan sarana pendukung seperti peralatan medis tersedia untuk pertolongan pertama dengan 1 tenaga paramedis yaitu bidan.

Prasarana peribadahan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana peribadahan di desa Long-Nah sudah dalam kondisi baik karena semua bangunan sama yaitu merupakan bangunan semi permanen. Bangunan yang ada hanya perlu untuk terus di perhatikan, di pelihara dan di jaga. Meski bangunan sudah dalam kondisi baik namun pemerintahan desa masih terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas bangunan yang ada.

Faktor Penghambat Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa yang menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan di desa Long-Nah adalah masalah dana. Dana yang di berikan terbatas dan dana ini seringkali terlambat di cairkan oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten.

Pembahasan

Sarana Jalan dan Jembatan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah di sajikan dalam penyajian data maka dapat di ketahui bahwa, sarana jalan dan jembatan merupakan unsur yang sangat penting dan mendasar pada pembangunan di Desa Long-Nah. Dalam segi pembangunan di Desa Long-Nah, untuk jembatan sudah di bangun jembatan yang dapat di gunakan untuk mengakses ke desa lain, kecamatan dan kabupaten sehingga jembatan yang ada ini sudah mencukupi karena sudah bisa menjangkau ke semua tempat yang diperlukan.

Adapun untuk saran jalan desa masih menjadi fokus utama dalam agenda tahunan karena jalan yang ada hanya dilakukan pengerasan dan peningkatan

sehingga jalan ini seringkali mengalami kerusakan apabila musim penghujan datang.

Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan, di antara komponen yang ada dalam sistem tersebut adalah sarana dan prasarana. Pengkajian terhadap sarana dan prasarana memang menjadi bahan diskusi yang tetap aktual dan menarik, karena sarana dan prasarana turut menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa sarana pendidikan di desa Long-Nah sudah tersedia dua buah bangunan sekolah dasar yang digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Dari kedua bangunan ini satu bangunan dalam keadaan baik, dalam artian bangunan ini layak untuk digunakan. Namun satu bangunan lainnya dalam kondisi tidak baik karena bangunan berada di dekat bantaran sungai dan bangunan hampir longsor sehingga bangunan ini perlu untuk di relokasikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Bangunan sekolah ini rencananya akan di relokasikan ke KM 03 dusun Belwen yang jaraknya cukup jauh dari bantaran sungai.

Sarana Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Hal ini yang telah di upayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap masyarakat desa yang memiliki ekonomi rendah terutama desa-desa yang memiliki jumlah penduduk sedikit dengan penghasilan yang kurang. Dengan adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tersebut, untuk pelayanan yang mudah, merata dan murah di harapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk sarana kesehatan di desa Long-Nah yang tersedia hanya puskesmas pembantu sehingga pemerintah desa berusaha untuk terus meningkatkan lagi baik itu pelayanan maupun peralatan medis. Namun di puskesmas pembantu hanya memiliki satu tenaga paramedis yaitu bidan, puskesmas pembantu ini tidak memiliki dokter umum maupun perawat. Untuk sarana penunjang seperti ambulans tidak tersedia, sarana penunjang yang ada hanya sebatas peralatan mendasar sehingga hanya cukup untuk melakukan pertolongan pertama.

Prasarana peribadahan

Salah satu indikator meningkatnya kehidupan beragama yaitu dengan melihat perkembangan sarana ibadah, oleh karena itu untuk menunjang kegiatan

agama tersebut perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana yang di maksud di desa Long-Nah adalah bangunan peribadahan itu sendiri, dimana semua sarana peribadahan yang di perlukan sudah tersedia, karena desa Long-Nah mayoritas penduduknya beragama Islam dan Kristen maka bangunan peribadahan yang di sediakan juga hanya masjid dan gereja. Rumah ibadah ini sudah baik karena semua bangunan berupa bangunan semi permanen, bangunan yang ada hanya perlu di perhatikan dan di pelihara. Meskipun bangunan tempat ibadah sudah baik namun pemerintah desa masih terus berusaha untuk meningkatkan lagi bangunan yang ada agar jadi lebih baik lagi.

Faktor Penghambat Pembangunan

Pembangunan desa adalah pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan/ penghidupan masyarakat tersebut. Akan tetapi dalam proses pembangunan desa khususnya di bidang infrastruktur pasti akan mengalami kendala-kendala yang tidak bisa di hindari.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Long-Nah adalah kendala dalam masalah pendanaan atau keuangan. Dana yang di berikan pemerintah kabupaten seringkali terlambat di cairkan sehingga pembangunan yang ada tidak bisa dilakukan dengan efektif, kemudian dana yang di berikan juga terbatas sehingga pembangunan yang di lakukan tidak bisa di lakukan secara optimal karena dana yang diberikan tidak semua untuk pembangunan tetapi untuk hal lainnya juga.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil peneltian pembangunan infrastruktur fisik di desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa hal sebagai kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan infrastruktur fisik di desa Long-Nah masih kurang memadai, hal itu dapat dilihat dari ulasan Rencana Pembagunan Jangka Menengah desa yang dimana dari usulan kegiatan desa Long-Nah masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik, diantaranya:
 - a. Akses jalan dalam dan antar dusun yang masih perlu perbaikan dan peningkatan karena jalan-jalan ini hanya berupa jalan tanah biasa yang kemudian dilakukan pengerasan dan penimbunan saja dan tidak adanya proses semenisasi

- b. Sarana pendidikan, untuk sarana pendidikan perlu adanya kegiatan relokasi bangunan karena salah satu sekolah dasar yang ada di desa Long-Nah sudah hampir longsor.
 - c. Sarana kesehatan, dilihat dari sarana dan prasarana kesehatan dimana hanya memiliki puskesmas pembantu perlu adanya penambahan tenaga medis, dan kelengkapan peralatan medis agar pelayanan bisa dilakukan dengan maksimal.
 - d. Sarana peribadahan, sarana peribadahan masih perlu perhatian, walaupun dirasa sudah cukup karena bangunan sudah berupa bangunan semi permanen namun tidak menutup kemungkinan bangunan ini akan dijadikan bangunan permanen.
2. Faktor penghambat
- Yang menjadi faktor penghambat di dalam penelitian ini adalah kendala dalam masalah pendanaan atau keuangan, baik itu kekurangan dana maupun dana lambat dicairkan sehingga seringkali proses pembangunan terhambat dan tidak bisa dilakukan dengan optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Long-Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pembangunan fisik di desa Long-Nah terutama pada jalan sebaiknya pemerintah desa mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten agar dibuatkan jalan yang berupa semenisasi agar jalan yang ada tidak perlu perbaikan secara menyeluruh setiap tahunnya.
- b. Untuk bidang pendidikan agar dapat lebih diperhatikan tentang kondisi sekolah,
- c. Adapun sarana kesehatan sebaiknya ada penambahan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pelayanan kesehatan di desa Long-Nah.
- d. Faktor dana seringkali menjadi penghambat utama dalam pembangunan sehingga sebaiknya anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur lebih di perhatikan oleh Pemerintah Daerah Kutai Timur , karena pembangunan infrastruktur fisik merupakan sarana penunjang yang sangat di butuhkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Era Reformasi*, Bandung.: Alfabeta.

- Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Long-Nah(Agustina)
- Anonim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ketiga), Balai Pustaka:
Jakarta
- Dwipayana, AAGN, dkk. 2004. *pembaharuan Desa Secara Partisipatif*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Bachtiar. 2002.*Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*.
Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- LEMHANAS, 1997, *Pembangunan Nasional*, Jakarta: BALAI PUSTAKA.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman And Johnny Saldana.
2014 . *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhimin. 2004. *Pembangunan Wilayah,
Persepektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:
Alfabeta.
- Patton, Adri. 2005. *Peran Informal Leader dalam Pembangunan Desa di
Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau Utara*, Malang: Unversitas
Brawijaya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Departemen
pendidikan Nasional. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajah
Mada university Press.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.

_____. 2014. *Administrasi Pembangunan, konsep, dimensi, dan strateginya*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfaberta.

Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widjaja, A, W. 2004. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.